

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN  
YANG DIAJUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG PASKA  
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEMATIAN  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR  
3034/Pdt.G/2018/PA.Badg)**

**PENULISAN HUKUM**



Oleh:  
**RISKI DIANA SARI**  
201610110311244

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN  
YANG DIAJUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG PASKA  
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEMATIAN  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR  
3034/Pdt.G/2018/PA.Badg)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:  
RISKI DIANA SARI  
201610110311244



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN YANG  
DIAJUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG PASKA PUTUSNYA  
PERKAWINAN KARENA KEMATIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA NOMOR 3034/PDT.G/2018/PA.BADG)

Diajukan Oleh:

**RISKI DIANA SARI**

201610110311244

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 22 Oktober 2020

Pembimbing Utama,



M. Isrok, SH., CN., MH

Pembimbing Pendamping,



Isdian Ambrany, S.H., MKn

Dekan,



Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**RISKI DIANA SARI**

**201610110311244**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 22 Oktober 2020

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : M. Isrok, SH., CN., MH

Sekretaris : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji I : Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sofyan Arief, SH., MKn



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RISKI DIANA SARI

NIM : 201610110311244

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN YANG DIAJUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG PASKA PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEMATIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3034/PDT.G/2018/PA.BADG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 November 2020



*Riski Diana Sari*  
Riski Diana Sari



## MOTTO

### **Ungkapan Pribadi :**

Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan. - Tan Malaka



### **Motto :**

Tidak ada keberanian tanpa rasa takut.

## **ABSTRAK**

**Nama** : Riski Diana Sari  
**NIM** : 20160110311244  
**Judul** : Tinjauan Yudiris Terhadap Putusan Pembatalan yang Diajukan oleh Pejabat yang Berwenang Paska Putusnya Perkawinan Karena kematian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 3034/Pdt.G/2018/PA.Badg)  
**Pembimbing I** : Mohammad Isrok, S.H., C.N.,  
M.H  
**Pembimbing II** : Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 23 huruf (C) Pembatalan perkawinan dapat dibatalkan hanya selama perkawinan belum diputus, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3034/pdt.G/2018/PA/Badg dalam putusan tersebut mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan paska putusnya perkawinan karena kematian. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut yang pertama adalah mengetahui tentang bagaimana suatu perkawinan yang telah putus karena kematian dapat dibatalkan melalui permohonan pembatalan oleh pejabat yang berwenang dan yang kedua adalah mengetahui tentang pertimbangan Hakim dalam putusan pembatalan perkawinan oleh pejabat yang berwenang terhadap perkawinan yang telah putus karena kematian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan Undang-Undang. Hasil penelitian tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwasannya Pemohon (Pejabat yang berwenang) mempunyai kewenangan dalam mengajukan pembatalan perkawinan dan mengabulkan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang sudah putus karena kematian, pertimbangan hakim terkait hal ini karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Dalam hal ini seharusnya perkawinan ini tidak perlu adanya pembatalan perkawinan karena sudah otomatis putus karena salah satu pihaknya meninggal dunia sebelum adanya gugatan pembatalan perkawinan.

**Kata Kunci** : Pembatalan Perkawinan, Pejabat yang Berwenang, Kematian

## **ABSTRACT**

**Name** : Riski Diana Sari  
**NIM** : 20160110311244  
**Title** : **Judicial Review of Annulment Decisions Submitted by Authorized Officials After Marriage Breakdown Due to Death (Study of Religious Court Ruling No. 3034/Pdt.G/2018/PA. Badg)**  
**Advisor I** : **Mohammad Isrok, S.H., C.N., M.H**  
**Advisor II** : **Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn**

Based on The Marriage Act Article 23 letter (C) Annulment of marriage can be annulled only as long as the marriage has not been decided, but in the ruling of the Bandung Religious Court No. 3034/pdt. G/2018/PA/Badg in the ruling granted the request for annulment of marriage after the breakup of marriage due to death. Therefore in this study take the formulation of the problem as follows the first is to know about how a marriage that has broken up due to death can be annulled through an annulment request by the authorized official and the second is to know about the Judge's consideration in the annulment of marriage by the presiding officer of the marriage who has broken up due to death. This research uses normative juridical methods with case and Act approaches. As a result of the study, the Judge of the Bandung District Court stated that the Applicant (authorized Official) has the authority in applying for annulment of marriage and granting annulment of marriage to a marriage that has been broken by death, consideration of the judge related to this because of the unfulfillment of the conditions and pillars of marriage. In this case, this marriage should not need a marriage annulment because it has been automatically broken up because one of the parties passed away before the marriage annulment lawsuit.

**Keywords : Annulment of Marriage, Authorized Official, Death**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN YANG DIAJUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG PASKA PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEMATIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3034/Pdt.G/2018/PA.Badg)”**

Tujuan dari penyusunan tugas akhir atau skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana hukum dan kemudian dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Proses menyelesaikan tugas akhir ini mengajarkan penulis tentang banyak hal. Tentang perjuangan, mimpi-mimpi, dan tentang mahalunya Ilmu Tuhan. Menyelesaikan tugas akhir ini adalah hal yang membanggakan bagi penulis, karena menjadi pertanggung jawaban penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat bagi kalangan pemerhati hukum. Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayah dan Ibu, dan seluruh saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tiada hentinya yang telah memberikan dukungan secara materil dan immateril dari awal kuliah hingga detik ini.
2. Dr. Drs. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Mohammad Isrok, S.H., C.N., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan banyak membantu dan direpotkan disela-sela kesibukan beliau yang sangat padat dan masih dapat memeriksa dan membimbing Penulis dengan memberikan banyak masukan yang berguna bagi Penulis dalam proses Penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan serta pengetahuan yang baru bagi penulis.
6. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu

7. Riski Diana Sari selaku penulis. Terima kasih karena perjalanan hingga ke titik ini tidak mudah tapi kamu berhasil melewatinya.
8. Erik Yuda Perkasa selaku manusia yang baik hati selalu menyemangati dan selalu ada dalam suka maupun duka bagi penulis.
9. Teman-teman Arisan Villa Allen, Bila, Fina, Habiba, Indah, Jovanka, Novia selaku teman – teman penulis yang telah bersama – sama semenjak awal kuliah hingga kini, yang telah memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya.
10. Teman-teman Blitar Novi, Wilda, Nesi, Rini yang selalu ada dan telah memberikan dukungan tiada henti-hentinya.

Penulisan tugas akhir ini sudah layak untuk mendapatkan gelar strata 1 dan dipertahankan dihadapan penguji. Sumbangsih pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Aamiin.

Malang, 18 Oktober 2020

Riski Diana Sari



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II .....	18
TINJAUAN PUSTAKA .....	18
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	18
1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya.....	18
2. Tujuan Perkawinan.....	20
3. Sahnya Perkawinan.....	21
4. Pencatatan Perkawinan .....	24
5. Akibat Adanya Perkawinan .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	28
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan dan Dasar Hukumnya .....	28

2. Perbedaan Pembatalan Perkawinan dan Pencegahan Perkawinan .....	32
3. Prosedur dan Siapa Saja yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan .....	33
4. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan .....	39
5. Putusnya Perkawinan .....	40
6. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Kasus Posisi .....	48
1. Para Pihak .....	48
2. Duduk Perkara .....	49
B. Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan oleh Pejabat Yang Berwenang Terhadap Perkawinan yang Telah Putus Karena Kematian .....	51
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pejabat yang Berwenang Terhadap Perkawinan yang Telah Putus Karena Kematian .....	63
<b>BAB IV .....</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 : Surat Tugas**

**Lampiran 2 : Surat Observasi**

**Lampiran 3 : Kartu Kendali Bimbingan (Pembimbing 1) dan Pembimbing (2)**

**Lampiran 4 : Berita Acara Seminar Proposal**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah hal penting dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum anatar suami – isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.<sup>1</sup> Lewat perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan tiap-tiap hukum agama sehingga perkawinan bisa dikatakan legal/sah. Dengan kebasahan perkawinan tersebut, diharapkan bisa menghasilkan kehidupan rumah tangga yang damai, tentram, serta mewujudkan rasa kasih sayang dalam suatu perkawinan.

Dengan terdapatnya perkawinan, diharapkan bisa tercapainya tujuan perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-undang ataupun ketentuan hukum dan serta cocok dengan ajaran agama yang dianut.<sup>2</sup> Perkawinan

---

<sup>1</sup> Mr Martiman Prodjohamidjojo, 2011, MM, MA, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Hlm. 1

<sup>2</sup> Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Pranata Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 8, No. 2, <https://media.neliti.com/>, Access 21 Februari 2020, Hlm. 156

sendiri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tanggal 1 April 1975, maka Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Undang-undang ini bersifat nasional, unikum, karena sebelum lahirnya undang-undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Bagi siapapun yang hendak melakukan suatu perkawinan diwajibkan mendaftarkan diri terlebih dulu ke KUA Kecamatan, dengan tujuan mengetahui secara jelas identitas dirinya. Maka bukti yang menerangkan identitas dirinya berupa Ijazah (bila memiliki), Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu keluarga (KK) dan surat dari Kepala Desa/Gampong (Geuchik-Aceh) tempat perkawinan itu akan dilaksanakan serta apabila para calon hendak melakukan perkawinan di luar wilayah, maka orang tuanya diminta hadir dalam rangka dimohon memberikan keterangan bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Berikutnya KUA

---

<sup>3</sup> Mr Martiman Prodjohamidjojo, 2011, MM, MA, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Hlm. 1

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 8



selaku lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik sah bagi agama ataupun pemerintah, berkewajiban mengetahui bahwa kedua calon mempelai merupakan pasangan yang sah (bukan mahram) atau tidak berhak melaksanakan perkawinan menurut agama dan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain tentang Perkawinan. Maka dari itu sangatlah penting pengetahuan bagi pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai karena akan berdampak pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Bila perkawinan yang sesungguhnya tidak sah tersebut dilangsungkan, sehingga itu merupakan perzinaan, sebab termasuk perkawinan yang terjalin merupakan perkawinan antar seorang pria dan wanita yang masih terdapat ikatan nasab.<sup>5</sup>

Sehingga dengan terdapatnya identitas diri ini ataupun penjelasan status individu, maka apabila terdapat penyalahgunaan ataupun pemalsuan identitas diri dari pihak yang hendak melakukan perkawinan, sehingga akan menjadi permasalahan di kemudian hari apabila identitas dan keterangan diri yang diserahkan merupakan identitas yang tidak benar ataupun palsu. Maka akibat dari perbedaan diatas akan berakibat pada kurangnya syarat dalam melangsungkan perkawinan dan bisa merugikan salah satu pihak. Semacam kasus yang berkaitan dengan surat keterangan persetujuan kedua calon mempelai yang merupakan syarat perkawinan, atau surat keterangan yang

---

<sup>5</sup> Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Langsa, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/>, Access 13 Juli 2020, Hlm. 3

menyatakan bahwa salah satu mempelai adalah duda/janda yang tinggal mati namun tidak menyertakan surat kematian, ataupun surat keterangan persetujuan isteri pertama untuk pria yang akan berpoligami, atau calon isteri sudah hamil terlebih dahulu dengan laki-laki lain, di mana kesemuanya itu berkemungkinan adanya pembatalan perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam hal pembatalan perkawinan tidak semua orang dapat melakukan pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan sendiri dapat diajukan oleh salah satu pihak yang bersangkutan dalam sebuah perkawinan. Dan juga bisa diajukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk atau orang lain yang mempunyai kompetensi hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

Siapa saja pihak-pihak yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 4

- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.<sup>7</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, sah tidaknya suatu perbuatan hukum didasarkan oleh hukum dan norma agama yang berlaku saat ini. Dalam perkawinan sendiri sangat penting untuk memenuhi rukun dan syarat perkawinan, rukun perkawinan memang suatu keharusan untuk dipenuhi dalam suatu perkawinan karena apabila salah satu rukun perkawinan yang sudah ditentukan tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut juga berlaku untuk syarat perkawinan juga haruslah dipenuhi karena apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.<sup>8</sup>

Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan : *“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”*.<sup>9</sup> Pembatalan perkawinan, yakni menganggap perkawinan yang telah dilaksanakan merupakan suatu perkawinan yang tidak sah atau dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada. Menurut Undang-Undang Perkawinan, peraturan pembatalan perkawinan ada dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Pembatalan perkawinan hanya dapat melalui karena adanya putusan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm. 8-9.

<sup>8</sup> Musriyadi, *Pembatalan Perkawinan ( Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 929/Pdt.G/2007/PA.Pwt )*, Fakultas Hukum Purwokerto 2012, Hlm. 3

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, S.H., Abdurrahman, S.H., 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Hlm. 35

Pengadilan jadi dengan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan, maka perkawinan yang telah dilakukan tersebut dianggap tidak pernah ada. Walaupun perkawinan yang telah terjadi tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak memungkiri atau menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Selain yang telah disebutkan di atas, pembatalan perkawinan sendiri mempunyai arti penting, pembatalan perkawinan tidak hanya berdampak pada pasangan suami isteri tetapi juga berdampak pada pihak-pihak yang lain yang yakni seperti harta benda dalam perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Apabila Hakim Pengadilan Agama mengambil keputusan maka harus memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara pembatalan perkawinan yang ditangani nya.<sup>10</sup>

Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, tetapi yang dimaksud pejabat yang berwenang oleh Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pejabat tersebut.<sup>11</sup> Pembatalan perkawinan sendiri pengajuannya dilakukan di pengadilan agama yakni dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam mengajukan permohonan perkawinan sangat penting

---

<sup>10</sup> Tami Rusli, *Op.Cit*, Hlm. 157-158

<sup>11</sup> *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 23 huruf (c)*

untuk dilihat terlebih dahulu pihak mana yang dapat mengajukan permohonan pembatalan tersebut dan disertai alasan-alasan sehingga permohonan pembatalan perkawinan dapat diterima.<sup>12</sup>

Salah satu perkara tentang pembatalan perkawinan adalah pengajuan pembatalan perkawinan oleh pemohon yaitu penghulu yang menikahkan pihak yang bersangkutan dengan didasari alasan adanya surat somasi dari pihak keluarga isteri yakni dari saudara kandungnya sendiri melalui kuasa hukumnya yang isinya pernyataan keberatan atas perkawinan suami isteri tersebut karena dirinya tidak pernah menjadi wali nikah dan juga tidak pernah menghadiri acara pernikahan tersebut, tetapi dalam Buku Daftar Pemeriksaan Menikah, Buku Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah ditulis nama wali nikah adalah wali nasab yakni saudara kandungnya tadi. Yang mana sebenarnya perkawinan yang diajukan permohonan pembatalan tersebut seharusnya otomatis sudah putus karena dari pihak isteri sudah meninggal sebelum diajukannya pembatalan perkawinan (putus karena kematian).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah relatif netral, yakni hanya orang-orang tertentu yang berhak mengajukannya, maka karenanya harus dipertimbangkan apakah Pemohon layak mengajukan pembatalan atau tidak, yang dalam hal ini Pengadilan berpendirian sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Iin Zefanya Lien Sebesty, *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013, Hlm. 5

Bahwa sesuai pasal 23 huruf (c) undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa yang berhak mengajukan pembatalan adalah pejabat yang berwenang selama perkawinan tersebut belum diputus, ternyata yang dimaksud pejabat yang berwenang oleh undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pejabat tersebut;

Bahwa oleh karenanya dalam hal ini Pengadilan berpendapat salah seorang pejabat tersebut adalah kepala Kantor Urusan Agama selaku PPN yang mempunyai kewenangan mencatat pernikahan dan mengawasi bawahannya dalam melaksanakan tugasnya, hal ini berdasarkan ayat (1) pasal 1 undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jis ayat (1) pasal 43 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan dapat menerima permohonan yang diajukan Pemohon karena Pemohon mempunyai kompetensi untuk mengajukannya;

Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwasannya pembatalan perkawinan terkait dengan pengajuan pembatalan, perkawinan dapat dibatalkan hanya selama perkawinan belum diputus tetapi dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3034/Pdt.G/2018/PA.Badg, dalam Putusan tersebut Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan hal yang esensial dalam suatu perkawinan adalah keberadaan wali beserta izinnya, sehingga dengan demikian pernikahan tersebut telah



cacat dan tidak sah. Disebutkan juga dalam pasal 23 huruf (c) yang dapat membatalkan perkawinan adalah pejabat yang berwenang dalam kasus ini Pengadilan berpendapat salah seorang pejabat tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang mana pemohon dalam perkara ini menjabat sebagai Penghulu Madya pada KUA Kecamatan Lengkong Kota Bandung. Kasus tersebut menarik sehingga penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai permasalahan dalam pembatalan perkawinan dan mengangkat kasus tersebut menjadi skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN YANG DIAJUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG PASKA PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA KEMATIAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 3034/Pdt.G/2018/PA.Badg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian hukum ini akan muncul berbagai permasalahan yang beragam dan sangat luas. Oleh karena itu untuk mengkhususkan masalah pada penelitian ini maka masalah yang akan dibatasi dan difokuskan dengan mengidentifikasi masalah utamanya, yaitu :

1. Apakah suatu perkawinan yang telah putus karena kematian dapat dibatalkan melalui permohonan pembatalan oleh pejabat yang berwenang?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan pembatalan perkawinan oleh pejabat yang berwenang terhadap perkawinan yang telah putus karena kematian?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat serta kongkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut di atas, yaitu :

1. Mengetahui tentang bagaimana suatu perkawinan yang sudah putus karena kematian dapat dibatalkan melalui permohonan pembatalan oleh pejabat yang berwenang.
2. Mengetahui dan menganalisa tentang pertimbangan Hakim dalam putusan pembatalan perkawinan oleh pejabat yang berwenang terhadap perkawinan yang telah putus karena kematian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk penulis yaitu dalam menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan

masalah dalam penelitian yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sehingga bisa menjadi acuan dan bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah secara mendalam tentang cara dalam menyelesaikan perkara yang terjadi diluar pengadilan
- b. Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Untuk memberikan informasi dalam setiap perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan yang akan dibahas dalam proposal ini yaitu dikabulkannya pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang sudah cerai mati.

### **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan penulisan tugas akhir ini, untuk memberikan kebenaran dari penulis maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, karena metode penelitian sangat penting dalam penulisan tugas akhir sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisa terhadap data-data dari penelitian untuk menghasilkan

jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metode yang di gunakan oleh penyusun adalah penelitian hukum Normatif.

## **1. Metode Pendekatan**

Identifikasi ruang lingkup berdasar pada masalah sebagaimana telah diuraikan, permasalahan dapat dikaji secara komprehensif dan holistic, dalam hal ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative (*normative legal research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan perundang-undangan, dan didukung dengan literatur yang ada mengenai pokok permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis mengacu pada norma-norma hukum yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, makalah-makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembuktian dalam sebuah perkara.

Adapun metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual.

### **a. Pendekatan Undang-undang**

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara meneliti semua Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan Undang-undang dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan yang baik secara praktis maupun akademis<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum (cetakan ke-11)*, Jakarta : Kencana.

### **b. Pendekatan Kepustakaan**

Pendekatan Kepustakaan diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, jurnal dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dalam ilmu hukum dengan penelitiannya dan merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>14</sup>

### **c. Pendekatan Studi Putusan**

Studi putusan dilakukan dengan melakukan studi pada suatu putusan pengadilan yang sudah inkrah tetapi ada suatu kejanggalan dalam putusan tersebut menurut penulis. Sehingga penulis dapat menemukan referensi dari kasus serupa untuk penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum yang diangkat. Studi putusan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sesuai isu hukum yang terjadi di Indonesia.

## **2. Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan berasal dari penelitian kepustakaan, yakni data yang diperoleh tidak langsung dari responden, melainkan didapatkan dengan studi kepustakaan (Library research), yang berasal dari buku, jurnal, ensiklopedi, dan kamus Penelitian kepustakaan

---

<sup>14</sup> Ibid

artinya dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan ilmiah terkait permasalahan yang di teliti selanjutnya memasukkan hal-hal penting terkait penelitian.

Penelitian kepustakaan ini akan penulis lakukan pada:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang Kampus III
- b. Situs-situs internet sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan,

maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum,

yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Putusan Perkara nomor 3034/Pdt.G/2018/PA.Badg

- b. Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder adalah informasi pelengkap yang didapat dari dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian dan juga dapat didapat dengan melakukan studi pustaka, yaitu buku-buku, perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan penunjang yang didapatkan melalui menelaah kamus atau ensiklopedia terkait beberapa pengertian baku maupun informasi yang diperoleh melalui internet dan lain-lain yang masih ada kaitannya dalam penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

a. Study Kepustakaan

Dalam pengumpulan bahan hukum yakni menggunakan teknik model studi kepustakaan (*library research*). Yaitu menelaah data yang tertulis mengenai hukum yang didapat dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara menyeluruh serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

b. Penelusuran Internet

Dalam pengumpulan informasi bahan hukum yakni dengan menggunakan teknik studi penelusuran internet. Yaitu mencari data tertulis terkait hukum melalui berbagai sumber yang berasal dari macam-macam website yang ada dalam internet.

#### **4. Analisis Data**

Selanjutnya apabila bahan hukum sudah terkumpul maka penulis akan memulai analisa permasalahan hukum yang diatur didalam Perundang-undangan dan putusan pengadilan akan dikaji dan dianalisis dengan kaidah-kaidah dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan ini, sehingga dapat menjawab permasalahan dengan ilmiah, obyektif, komprehensif dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam menganalisis maka norma-norma dan teori-teori yang harus diutamakan ialah mengenai pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang sudah putus karena kematian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan penelitian ini, penulis akan menyajikan dalam empat bab yang didalamnya terdiri dari sub bab sub bab, sistematika penulisannya sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terkait hal-hal yang melatar belakangi penulis mengambil judul tersebut serta berisi gambaran permasalahan mengenai yang akan penulis teliti. Selain itu juga untuk pengantar dalam memahami penulisan penelitian ini, yang keseluruhannya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai landasan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini. Pada bab ini juga akan berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang meneliti permasalahan yang hampir sama yakni meneliti tentang Pembatalan Perkawinan. Yang isinya terdiri dari tujuan umum tentang perkawinan dan tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian tentang jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti mengenai pembatalan perkawinan yang sudah putus karena kematian oleh pejabat yang berwenang serta menguraikan metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

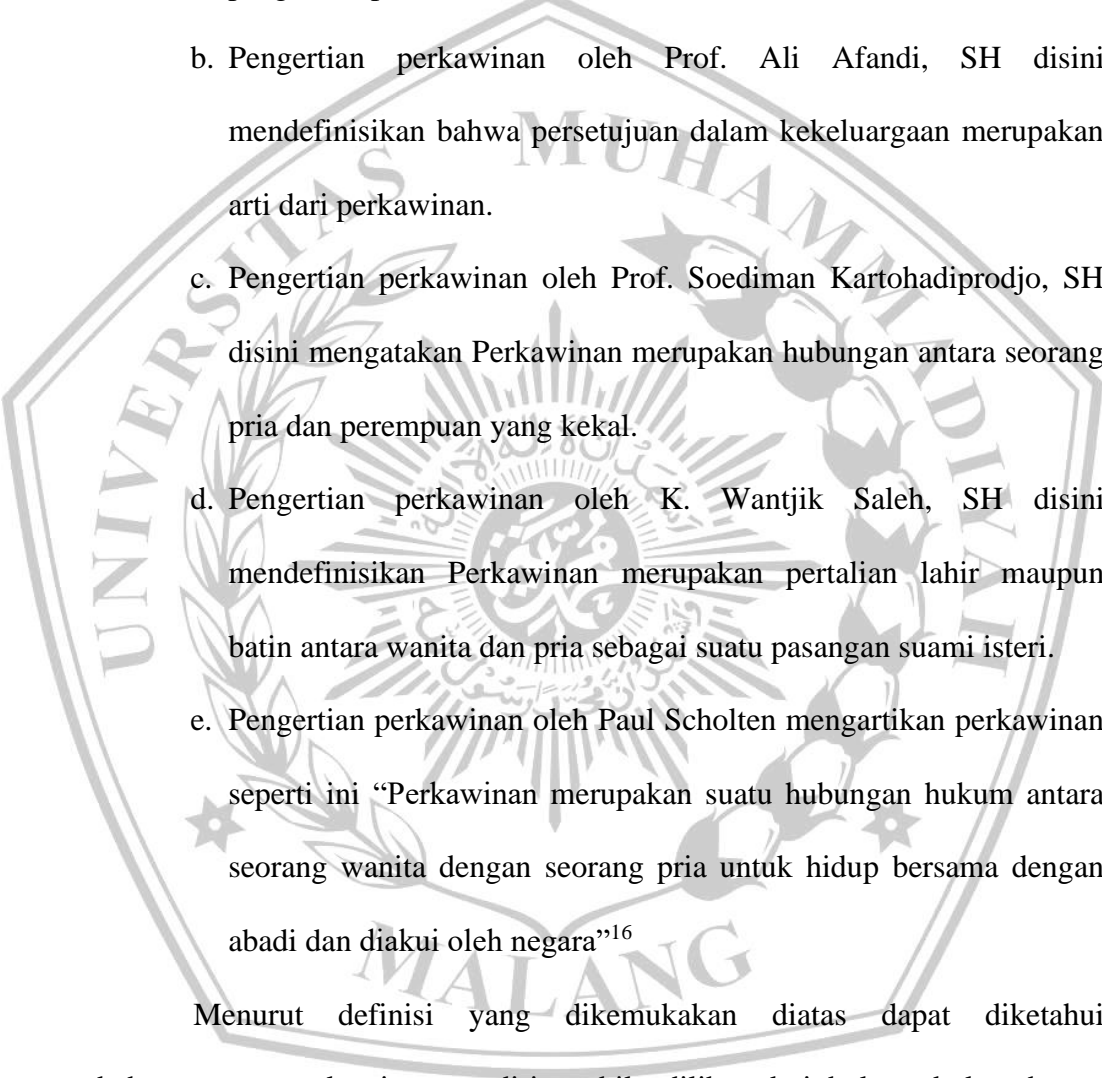
##### **1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya**

Pengertian perkawinan berdasarkan hukum pada setiap Negara yang berlaku tentang kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup> Undang-undang R.I. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." V Dari bunyi pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. "Arti" perkawinan dimaksud adalah : ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk pengertian perkawinan yang lainnya, beberapa ahli hukum memberikan pendapatnya maka disini penulis mengacu pada pendapat tersebut, berikut adalah pendapat para ahli hukum tentang perkawiann :

---

<sup>15</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1991), Cetakan kesembilan, hal. 7.

- 
- a. Pengertian perkawinan oleh Prof. Subekti, SH, perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seseorang perempuan dan lelaki dalam kurun waktu yang cukup lama, berikut merupakan pengertian perkawina menurut Menurut Prof. Subekti, SH
- b. Pengertian perkawinan oleh Prof. Ali Afandi, SH disini mendefinisikan bahwa persetujuan dalam kekeluargaan merupakan arti dari perkawinan.
- c. Pengertian perkawinan oleh Prof. Soediman Kartohadiprodjo, SH disini mengatakan Perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dan perempuan yang kekal.
- d. Pengertian perkawinan oleh K. Wantjik Saleh, SH disini mendefinisikan Perkawinan merupakan pertalian lahir maupun batin antara wanita dan pria sebagai suatu pasangan suami isteri.
- e. Pengertian perkawinan oleh Paul Scholten mengartikan perkawinan seperti ini “Perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang wanita dengan seorang pria untuk hidup bersama dengan abadi dan diakui oleh negara”<sup>16</sup>

Menurut definisi yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwasannya perkawinan sendiri apabila dilihat dari hukum bukan hanya

---

<sup>16</sup> Avriaztheni Putri Gayatri, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Indonesia 2010, Analisis Pembatalan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Sudah Putus Karena Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor :2085/PDT.G/2004/PA.TS)*, Hlm. 12-13.

akan mementingkan pada suatu kepentingan perdata saja bahkan lebih dari itu yaitu mementingkan kepentingan lain seperti agama ataupun biologis.<sup>17</sup>

## **2. Tujuan Perkawinan**

### **a) Tujuan Menurut Perundangan**

Dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya perkawinan sendiri oleh pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah saja, tetapi satu ikatan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).<sup>18</sup>

### **b) Tujuan Menurut Hukum Adat**

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu- bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk-memperofeh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan/ Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang

---

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, S.H, Ketut Murtika, S.H, 1987, *Azas – Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Hlm.3

<sup>18</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH., 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Hlm. 22.



satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda.

### **c) Tujuan Menurut Hukum Agama**

Tujuan perkawinan adalah untuk juga membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Dan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai azas pertama dalam Pancasila. Dalam hukum perdata, hubungan antara suami dan isteri hanya melihat dari segi lahirnya saja atau dari segi hubungan perdata, artinya yaitu terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu. Perkawinan dalam agama Kristen dan Katholik bertujuan untuk meneruskan keturunan.<sup>19</sup>

### **3. Sahnya Perkawinan**

Sebagai salah satu perbuatan hukum, Perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu.<sup>20</sup> Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah

---

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, S.H., Ketut Murtika, S.H., *Op.cit*, Hlm. 5.

<sup>20</sup> K. Wantjik Saleh, S.H., 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Hlm. 15

ditentukan maka perkawinan itu tidak sah.<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan menjelaskan mengenai sahnya suatu perkawinan, yaitu :

- 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- 2) “Tiap-tiap perkawinan akan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>22</sup>

Maka disini sudah jelas apabila tidak mungkin dilakukan perkawinan berbeda agama, karena dalam hukum islam sendiri tidak sah melakukan perkawinan diluar syariat islam. Oleh sebab itu perkawinan wajib dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diyakini, perkawinan juga tidak dapat bertentangan terhadap undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bagi semua orang yang akan melaksanakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, maka harus terpenuhi syarat dan prosedur sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974. Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ada dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 berikut bunyinya :

- 1) Dengan terdapatnya suatu persetujuan kedua calon pengantin (Pasal 6 ayat (1)).

---

<sup>21</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH., *Op.Cit*, Hlm. 26

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan

2) Dengan terdapatnya izin dari orang tua atau wali untuk calon pengantin yang usianya belum 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) ).

3) Umur bagi calon pengantin pria minimal adalah 19 tahun dan untuk umur calon pengantin perempuan sudah berada pada umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).

4) Untuk calon pengantin wanita dan calon pengantin pria tidak dalam adanya ikatan darah/keluarga yang dilarang melakukan kawin (Pasal 8).

5) Masing- masing calon pengantin tidak sedang dalam ikatan perkawinan berasama pihak lain (Pasal 9).

6) Untuk pasangan suami isteri yang telah melakukan perceraian, selanjutnya melakukan perkawinan lagi dan melakukan ceraii lagi untuk yang kedua kalinya, menurut agama mauapun kepercayaan masing-masing tidak adanya larangan untuk melakukna perkawinan untuk yang ketiga (Pasal 10).

7) Untuk calon pengantin perempuan yang berstatus janda tidak sedang berada didalam waktu tunggu.<sup>23</sup>

Selanjutnya mengenai syarat suatu perkawinan dalam Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974, KUHPerdara dan HOCI yang pada dasarnya ialah sama,

---

<sup>23</sup> Akhmad Munawar, “*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*”, Journal Article, Al’ Adl Volume VII Nomo 13, Januari-Juni 2015, <https://www.neliti.com/id>, Acces 28 September 2020, Hlm. 25

tetapi ada beberapa suatu perbedaan yakni pada masalah umur untuk melakukan kawin. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan sendiri ialah minimal 16 tahun. Apabila dibandingkan dengan KUHPerdara dan HOKI minimal usia laki-laki 18 tahun dan untuk usia perempuan minimal adalah 15 tahun.

Mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan dapat dilihat melalui suatu keperdataan, bila perkawinan tersebut telah tercatat maupun terdaftar di Kantor Catatan Sipil. Selagi perkawinan tersebut belum didaftarkan, jadi perkawinan tersebut belum bisa dikatakan sah menurut peraturan hukum yang berlaku, meskipun sudah memenuhi syarat dan tata cara menurut ketentuan agama yang dianut. Apabila dilihat melalui segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebuah perbuatan administrasi saja dalam perkawinan yang telah terjadi dan tidak menentukan sah atau tidaknya atas suatu perkawinan.<sup>24</sup>

#### **4. Pencatatan Perkawinan**

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Bisa dikatakan disini bahwa tujuan dari adanya suatu pencatatan perkawinan itu adalah untuk menjadikan

---

<sup>24</sup> Avriaztheni Putri Gayatri, *Op.Cit*, Hlm. 26

peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik untuk yang bersangkutan ataupun bagi orang lain dan masyarakat, sehingga yang paling penting sebagai suatu alat-bukti tertulis yang otentik dan berlandaskan hukum. Maka dari itu adanya surat bukti atas suatu perkawinan dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Perbuatan pencatatan itu bukanlah untuk menentukan "sah"nya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwasannya peristiwa perkawinan yang dilaksanakan tersebut itu memang ada dan telah terjadi. Untuk melakukan pencatatan perkawinan pada pasal 2 Peraturan Pelaksanaan telah dinyatakan bahwasannya untuk yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan untuk mereka yang bukan beragama Islam, ditangani oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dalam penjelasan Undang-undang ayat 1 dan 2 pasal 2 dinyatakan juga bahwasannya pencatatan perkawinan dilakukan hanya pada dua instansi:

- 1) "Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- 2) Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya;"

## **5. Akibat Adanya Perkawinan**

Dari Terjadinya suatu perkawinan akan timbul berbagai masalah, disini dikatakan tiga masalah penting yakni : masalah terhadap hubungan

suami dan isteri, masalah terhadap hubungan orang tua dan anak serta yang terakhir mengenai masalah harta benda. Undang-undang Perkawinan mengatur masalah-masalah tersebut dalam Bab VI yaitu (Hak dan Kewajiban Suami-isteri), Bab IX yaitu (Kedudukan Anak) dan Bab X yaitu (Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak), dan selanjutnya Bab VII yaitu (Harta Benda dalam Perkawinan).

#### 1) Masalah Suami - Isteri

Permasalahan utamanya setelah terjadinya suatu perkawinan yakni adanya hubungan antara suami dengan isteri, pokok masalahnya yang mengenai persoalan hak dan kewajiban. UUP sendiri disini telah mengatur mengenai hal tersebut yakni ada pada pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Untuk suami dan isteri sudah mempunyai hak dan kedudukan yang sama baik dalam menjalani hubungan rumah tangga ataupun dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Persamaan yang lain adalah mengenai hal melakukan perbuatan hukum. Suami dan isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

#### 2) Masalah Orang Tua dan Anak

Dalam hal perkawinan melahirkan anak, untuk kedudukan dan hubungan dengan orang tua telah diatur dalam UUP pasal 42 sampai dengan pasal 49. Diatur bahwasannya orang tua harus merawat dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, hingga anak tersebut sudah menikah atau

mandiri. Kewajiban anak terhadap 'orang tua pertama sekali adalah untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik. Dan apabila anak telah dewasa, maka berdasarkan kemampuannya, anak tersebut wajib memelihara orang tuanya.

### 3) Masalah Harta-Benda

Selain mengenai permasalahan hak dan kewajiban, permasalahan harta-benda juga merupakan masalah utama yang bisa menimbulkan banyak perselisihan atau permasalahan dalam hubungan perkawinan, tidak memungkiri akan mengurangi kerukunan hidup dalam berumah tangga. Oleh karena itu, Undang-undang Perkawinan memberikan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37.

Telah diatur bahwasannya mengenai harta-benda yang didapat selama bersama. Apabila suami-isteri masing-masing telah membawa harta kedalam perkawinannya atau dalam perkawinannya itu seara individu telah memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap milik masing-masing dalam penguasaannya, kecuali apabila telah disetujui untuk dijadikan harta bersama, maka harta tersebut akan menjadi tentang harta bersama, baik suami atau isteri bisa menggunakannya melalui persetujuan salah satu pihak. Tetapi mengenai urusan harta bawaan, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya sendiri-sendiri atas harta benda tersebut.

Setelah itu diatur, bila perkawinan tersebut putus, maka tentang harta bersamanya, akan dinyatakan diatur menurut hukumnya sendiri-sendiri. Adapun yang dimaksud mengenai "hukumnya" tersebut merupakan hukum agama yang dianut, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang berlaku.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pengertian Pembatalan Perkawinan dan Dasar Hukumnya**

Pengertian pembatalan perkawinan yakni suatu tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwasannya perkawinan yang telah terjadi tersebut dinyatakan tidak sah (No Legal force or declared Void) maka sesuatu yang telah dinyatakan no legal force, maka keadaan tersebut dianggap tidak pernah ada (never exizted). Dari pengertian pembatalan yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan yang sudah terjadi diberi arti tidak sah
- 2) Maka secara langsung perkawinan tersebut diberi arti tidak pernah ada (never existed)
- 3) Maka dari itu, pria dan wanita yang perkawinannya dibatalkan akan dikira tidak pernah melakukan perkawinan sebagai suami-isteri.<sup>26</sup>

Perihal Pembatalan Perkawinan dalam UU Perkawinan (UU No.1 tahun 1974) pengaturannya termuat dalam Bab IV, pada pasal 22 sampai

---

<sup>25</sup> K. Wantjik Saleh, S.H., *Op.Cit*, Hlm.33-35

<sup>26</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan :Zahir Trading, 1975), hal 71.



dengan pasal 28 ; yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 tahun 1975) dalam Bab VI, pasal 37 dan 38. Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan : "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".<sup>27</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo memberikan pernyataan bahwasannya "kata dapat yang disebutkan disini tidak dapat dipisahkan dari kata dibatalkan yang memiliki arti bahwa perkawinan terbut semula adalah sah, kemudian baru menjadi batal karena dengan adanya putusan pengadilan (vernietigbaar) yang menyatakan batal sebagai lawan batal demi hukum."

Dapat dipahami terlebih dahulu apa saja yang dapat menyebabkan perkawinan batal atau dapat dibatalkan, yaitu antara lain:

- 1) Perkawinan batal jika:
  - a. Seorang suami tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat.
  - b. Mantan istrinya dinikahi oleh seorang pria
  - c. Apabila mantan istri yang sudah pernah ditalak tiga oleh suaminya menikah dengan pria lain, kecuali mantan istrinya sudah pernah melakukan pernikahan bersama pria lain dan melakukan cerai lagi dan masa iddahnya sudah habis.

---

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, S.H., Abdurrahman, S.H., 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Hlm. 36.

d. Perkawinan antar saudara pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun

1974 yaitu :

- Adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
- Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yakni dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya
- Adanya hubungan semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
- Adanya hubungan sepersusuan, yakni orang tua sepersusuan, anak sepersusuan dan saudara sepersusuan serta bibi atau paman sepersusuan.<sup>28</sup>

e. Istri merupakan saudara sekandung atau saudara juah.

2) Batalnya perkawinan :

- a. Suami yang berpoligami tanpa seizin Pengadilan Agama;
- b. Wanita yang dinikahi masih ada ikatan hubungan suami isteri dengan pria lain;
- c. Wanita dalam masa iddah;
- d. Melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai batas umur yang

telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 Tentang Perkawinan

- e. Tidak adanya wali atau bukan wali yang berhak saat melaksanakan perkawinan;
- f. Perkawinan dilangsungkan dibawah paksaan.

didalam pasal 23 dan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pihak siapa saja yang bisa melakukan pembatalan perkawinan (vernitigen):

- a. "Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami atau isteri."
- b. Suami atau isteri. Disini maksudnya adalah suami atau isteri bisa mengajukan pembatalan perkawinan karena ada alasan yang telah diatur dalam pasal Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan.
- c. Oleh Pejabat yang berwenang. Disini pejabat yang berwenang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tetapi hanya selama perkawinan tersebut belum diputuskan. Tetapi apabila sudah ada yang mengajukan permohonan pembatalan maka pejabat yang berwenang tersebut tidak bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang hanya selama belum ada putusan pengadilan.
- d. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan salah satunya adalah pihak yang masih mempunyai ikatan dalam perkawinan.

e. Pembatalan juga dapat dimintakan oleh pihak kejaksaan sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomo 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila perkawinan yang dilaksanak dilakukan oleh pejabat pencatat yang tidak berwenang ataupun apabila wali nikah yang bertindak adalah wali yang tidak sah atau apabila perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya dua orang saksi.<sup>29</sup>

## **2. Perbedaan Pembatalan Perkawinan dan Pencegahan Perkawinan**

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan antara kedua kata ini terdapat persamaan dan perbedaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 13 sampai dengan pasal 20 dan pasal 22 sampai dengan pasal 28.

Persamaan yang dimaksud diatas ialah ada pada sebabnya: yakni "apabila di antara kedua belah tidak memenuhi syarat- syarat yang ditentukan untuk berlangsungnya suatu perkawinan". Dan mengenai perbedaannya antara "Pembatalan" dan "Pencegahan" ini ialah :

- Pembatalan perkawinan : ialah terjadi setelah suatu perkawinan dilaksanakan;
- Pencegahan perkawinan : ialah terjadi sebelum suatu perkawinan dilaksanakan.

---

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 73.

Mengenai hal tersebut dalam UU Perkawinan Nomo 1 tahun 1974 telah diatur pada pasal 13 sampai dengan 20 dan pasal 22 sampai dengan 28. Pada peraturan Pelaksanaannya menentukan hanya seputar pembatalan perkawinan, seperti yang ada dalam pasal- pasal 37 dan 38, sedangkan dalam Peraturan Pelaksanaan tersebut mengenai pencegahan perkawinan tidak lagi diatur. Hal ini menurut pembuat Peraturan Pelaksanaan menganggap bahwa mengenai pencegahan sudah memadai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Di atas telah disebutkan bahwa mengenai pembatalan perkawinan tercantum dalam Peraturan Pelaksanaan pada pasal 37 dan 38.

Pengajuan pembatalan perkawinan prosedurnya sama dengan dalam pengajuan gugatan perceraian yang telah diatur didalam pasal 20 sampai dengan 36, dalam hubungannya dengan pembatalan perkawinan itu sejauh ini hal tersebut dapat diterapkan.<sup>30</sup>

### **3. Prosedur dan Siapa Saja yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan**

Sama halnya dengan “pencegahan” tidak setiap orang dapat mengajukan “pembatalan” perkawinan ke pengadilan, siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan seperti diatur dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 73 KHI yaitu:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm. 86-87.

### Pasal 23

- a) Para keluarga dari garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri
- b) Suami atau isteri
- c) Pejabat berwenang selama perkawinan belum diputuskan
- d) Pejabat yang ditunjuk oleh UU perkawinan pasal 16 ayat 2 dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.<sup>31</sup>

### Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat diri dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 UU perkawinan.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut pasal 73 KHI yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a) “Para keluarga dari garis keturunan keatas dan kebawah dari pihak suami atau isteri”
- b) “Suami atau isteri”
- c) “Pejabat berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang”
- d) “Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.”<sup>33</sup>

Namun tuntutan pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan kepada

Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23 Tentang Perkawinan

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 24 Tentang Perkawinan

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 73

<sup>34</sup> Muhammad Sulhi Mahbub, Skripsi Fakultas Syari'ah 2016, *Upaya Pembatalan Pernikahan Atas Kesalahan Penetapan Wali Hakim Oleh Wali Nasab (Studi Kasus Pernikahan driengan Akta 04/04/1/2012 di KUA Kecamatan Pabelan)*, Hlm. 60.

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan yang ada dalam daerah hukum daerah hukum yang dimana perkawinan itu dilaksanakan, atau pada tempat tinggal kedua pasangan suami isteri, suami atau isteri. UUP menganut prinsip : “tidak ada suatu perkawinan yang dengan sendirinya batal menurut hukum”. Pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.<sup>35</sup>

Dalam sebuah kasus pernikahan dengan Akta 04/04/I/2012 di KUA Kecamatan Pabelan, peran KUA Kecamatan Pabelan dalam menyelesaikan kasus kesalahan penetapan Wali Hakim adalah salah satunya dengan memberi opsi terhadap status perkawinan dalam kasus pernikahan tersebut yaitu dengan pembatalan perkawinan atau memperbaharui akad nikah dengan wali yang lebih berhak.

Mengenai pembatalan pernikahan pihak KUA berdasar pada UU No. 1 Tahun 1974 pasal 22 yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” dalam hal ini menurut Kepala KUA Kecamatan Pabelan, Drs. H. Muh. Ja“far M.Ag. syarat yang tidak terpenuhi yaitu wali nikah karena datanya dipalsukan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 37.

<sup>36</sup> Muhammad Sulhi Mahbub, *Op.Cit*, Hlm. 62.

Prosedur dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yakni dengan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan harus kepada Pengadilan yang berwenang. Dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975: “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.”<sup>37</sup>

Mengajukan panggilan dan permohonan untuk melakukan pemeriksaan pembatalan perkawinan prosedurnya diterangkan dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan:

- a) “Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak - pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawunan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.”
- b) “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan perceraian (ayat 2).”
- c) “Hal-hal yang berkaitan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.”<sup>38</sup>

Maka dari itu, semua yang ada hubungannya dengan pembatalan perkawinan tatacaranya sama dengan pasal 38 yakni tatacara perceraian .

Berdasarkan hal yang sudah diejlaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tata cara permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Pasal 37 Nomor 9 Tahun 1975

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Pasal 38 Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



- a) Pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon ataupun kuasanya yang diajukan kepada Pengadilan yang meliputi daerah hukumnya merupakan daerah tempat kediaman termohon, yang berisi memberitahukan mengenai untuk melakukan pembatalan perkawinan dengan disertai alasan-alasan yang digunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan tersebut (Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomo 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;
- b) Selanjutnya Pengadilan dalam hal ini memanggil termohon dengan tertulis yang dilampiri permohonan tentang pembatalan perkawinan, permohonan tersebut paling lambat adalah tiga hari sebelum dilaksanakan persidangan pemeriksaan dilakukan (Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);
- c) Pengadilan selanjutnya akan memeriksa isi permohonan pembatalan perkawinan yang sudah diajukan tersebut paling lambat tiga puluh hari dari dimulainya penajuan permohonan (Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975). Apabila termohon sedang di luar negeri untuk hal itu maka pemeriksaan dilakukan

paling lambat enam bulan dimulai dari gugatan pembatalan perkawina telah diterimam di Pengadilan Negeri;

- d) Pengadilan akan melakukan mediasi terhadap para pihak dan apabila mediasi tersebut tidak terjadi, maka pemeriksaan akan dilaksanakan melalui sidang tertutup, dan keputusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka;
- e) Jika putusan Pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, Panitera Pengadilan akan memberikan satu lembar dari putusan itu kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan, dan setelah itu akan dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
- f) Apabila pembatalan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama itu harus dimintakan pengukuhan atas putusan itu oleh Panitera Pengadilan Umum paling lambat yakni 7 hari dimulai setelah putusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk selanjutnya pengadilan memiliki kewajiban untuk mengembalikan putusan yang telah ada kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat yakni 7 hari dari penerimaan putusan itu untuk dilakukan pengukuhan, dengan mengatakan “dikukuhkan”, dan putusan dimintakan

pengukuhannya tersebut telah mendapat tanda tangan oleh Hakim serta mendapat cap dengan cap jabatan.<sup>39</sup>

Dengan telah adanya ketentuan yang terakhir ini, maka bagaimana caranya melakukan pembatalan perkawinan menjadi jelas, yakni sama dengan cara gugatan perceraian yang diatur secara terperinci dari pasal 20 sampai pasal 36, tentunya sejauh hal itu dapat diterapkan dalam hubungan dengan pembatalan itu.

#### **4. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan**

Didalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwasannya perkawinan bisa dilakukan pembatalan, jika pihak-pihak yang melakukan perkawinan kurang dalam pemenuhan syarat untuk melaksanakan perkawinan. Disini maksudnya adalah, apabila syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan seseuai yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum terpenuhi jadi perkawinan yang dimintakan pembatalannya memang bisa dibatalkan.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Avriaztheni Putri Gayatri, *Op.Cit*, Hlm. 44-45.

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
- 2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah;
- 3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
- 4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- 5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.<sup>40</sup>

## **5. Putusnya Perkawinan**

Perihal "putusnya perkawinan" ini dalam UU Perkawinan pengaturannya termuat dalam Bab VIII, pada pasal 38 sampai dengan 41 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No.9 tahun 1975) dalam Bab V, dari pasal 14 sampai dengan 36.

Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Pranata Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Vol. 8, No. 2, <https://media.neliti.com/>, Access 21 Februari 2020, Hlm. 161-162.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan

Penjelasan lebih lanjut mengenai pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena :

**a. Kematian**

Putusnya suatu perkawinan yang disebabkan kematian, merupakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena salah satu pihaknya telah meninggal dunia. Dari dimulai meninggalnya salah satu pihak itulah maka putusnya perkawinan itu terjadi. Tetapi yang menjadi persoalan disini adalah, siapakah atau instansi manakah yang mempunyai kompetensi untuk membuat atau mengesahkan surat mengenai keterangan matinya atau meninggalnya seseorang. Untuk kepastian hukum, surat mengenai keterangan yang berisi mengenai meninggalnya seseorang ini sepertinya memang penting bagi seseorang yang dengan adanya kematian suami atau isteri, digunakan untuk alat bukti otektik untuk melaksanakan perkawinan lagi misalnya.

Surat mengenai keterangan meninggalnya seseorang memang harus dibuat dan diberikan atau disahkan oleh instansi resmi yang memiliki kompetensi untuk menanganinya. Sampai sekarang instansi ini belum ada. Karenanya, suatu saat tidak dipungkiri akan banyak timbul masalah.

**b. Perceraian**

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakannya talak oleh seorang suami pada perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam, Putusnya perkawinan karena

perceraian ini dapat juga disebut "karena cerai talak" (pasal 14 No.9 tahun 1975), Perceraian ini harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan alasan/alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

Dalam pasal 18 Peraturan Pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) telah diatur bahwasannya perceraian ini dihitung sejak dari saat talak itu diucapkan di muka persidangan Pengadilan Agama.

### **c. Atas Putusan Pengadilan**

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah putusnya perkawinan yang dikarenakan adanya gugatan seorang isteri yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, atau karena gugatan seorang suami/isteri yang melaksanakan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan bukan Islam, dan gugatan tersebut dikabulkan Pengadilan dengan suatu keputusan. Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan ini disebut K. Wantjik Saleh SH (dalam bukunya "Uraian Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan") dengan istilah "cerai gugat", maka dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya disebutkan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan.

Putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan ini, bagi perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat jatuhnya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti. Sedangkan pada perkawinan yang

diselenggarakan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, terhitung sejak saat keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti itu didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil oleh pegawai pencatat (pasal 34 ayat (2) Peraturan Pelaksanannya).<sup>42</sup>

## **6. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan**

Keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap beberapa hal diatur dalam Pada pasal 28 ayat (2) UU Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwasannya :

- 1) “Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;”
- 2) “Suami atau istri yang bertindak dengan i’tikad baik, kecuali terhasdap harta bersama, bila pemptabalan perkawinan didasarkan pada adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;”
- 3) “Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sejauh mereka mendapat hak-hak dengan i’tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Terkait akibat hukum pembatalan perkawinan pada keputusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama mencakup 3 hal yakni :

- 1) Hubungan Suami Istri;

---

<sup>42</sup> Riduan Syahrani, S.H., Abdurrahman, S.H., 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Hlm.45-50.

Putusnya hubungan suami isteri adalah akibat hukum dari adanya suatu pembatalan perkawinan, pada perkawinan yang sudah dibatalkan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk peraturan boleh atau tidak bolehnya melakukan perkawinan kembali diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas. Disini telah diterangkan secara jelas apabila ingin melaksanakan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bisa atau tidaknya melakukan perkawinan kembali didasarkan pada 3 hal : yang pertama adalah penyebab dari batalnya suatu perkawinan, jika perkawinan yang dibatalkan tersebut dikarenakan alasan melanggar syarat yang telah diatur maka untuk selamanya tidak bisa melakukan perkawinan kembali meskipun mereka mempunyai keinginan untuk melakukan perkawinan kembali. Selanjutnya yang kedua adalah para pihak yang perkawinannya telah dinyatakan batal, dapat melakukan perkawinan kembali, tentunya harus secara sah telah terpenuhi persyaratan perkawinannya menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jika persyaratan perkawinan yang telah dilanggar hanya memiliki sifat sementara waktu saja maka mereka yang perkawinannya telah dinyatakan batal bisa melakukan perkawinan kembali. Selanjutnya yang ketiga adalah, apabila mereka telah bisa melakukan perkawinan kembali tetapi apabila alah



satunya tidak berkehndak untuk melakukan perkawinan kembali maka tetap tidak dapat dilangsungkannya peekawinan kembali, kepada para pihak yang melakukan perkawinan kembali maka pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.

## 2) Terhadap Kedudukan Anak

Batalnya suatu perkawinan tidak hanya berakibat pada putusnyya hubungan suami isteri tetapi juga akan berakibat pada keudukan anak. Didalam hukum positif memberikan pengecualian terhadap anak yang dilahirkan diluar perkaiwinan atau perkawinan yang tidak sah. Sehingga, terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau lahir diluar perkawinan maka tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya karena didalam hukum yang berlaku saat ini yakni UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dikehendaki adanya anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya.

Selanjutnya untuk kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pernyataan bahwasannya keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak. Maka meskipun perkawinan orang tuanya telah dinyatakan batal tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Anak dari orang tua yang perkawinannya dibatlakan masih

menjadi ahli waris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mengurus dan mendidik anak tersebut.

### 3) Terhadap Harta Bersama

Mengenai akibat hukum dari dibatalkannya suatu perkawinan terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasannya suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali berlaku surut terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan berdasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Maka meskipun perkawinan tersebut telah dilakukan pembatalan oleh Pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat - syarat perkawinan maka tetap adanya pembagian harta bersama.

Dalam pembagian harta bersama pada pembatalan perkawinan pembagiannya sama dengan pembagian harta bermasa dalam perceraian, untuk pengaturan pembagian harta bersama karen apembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasannya “apabila perkawinan telah putus dikarenakan perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya sendiri-sendiri.”

Didalam hukum Islam sendiri mengenai harta kekayaan isteri dan harta kekayaan suami selanjutnya akan dilakukan dengan cara terpisah satu dengan yang lainnya yaitu harta bawaan sendiri-sendiri atau harta yang

didapat setelah mereka ada dalam ikatan hubungan perkawinan. Pembagian harta bersama dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan para pihak sendiri. Untuk pembagian harta bersama maka harta bersama dibagi secara seimbang. Yang dimaksud seimbang disini seberapa jauh para pihak menghasilkan harta bersama tersebut. Jadi jika harta bersamam tersebut itu diperoleh lebih banyak karena usaha isteri maka isteri juga akan memperoleh bagian yang lebih banyak dan apabila harta tersebut lebih banyak diperoleh karena usaha suami maka bagian suami juga lebih banyak.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Tami Rusli, *Op.Cit.*, Hlm. 163-166.

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kasus Posisi**

##### **1. Para Pihak**

a. Drs. H. Dadang bin A. Hasanuddin, NIP.196504201993031003, Umur 53 tahun (Bandung, 20-04-1965), Agama Islam, Pendidikan Sarjana Strata Satu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jabatan Penghulu Madya pada KUA Kecamatan Lengkong Kota Bandung), beralamat kantor di Jalan Palasari No.2A, Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung, Dalam ini telah memberi kuasa Khusus kepada Dede Itang, S.Ag.,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Deit & Deitya Partners", beralamat di Jl. Gumuruh 6 No.2 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2018, selanjutnya disebut Pemohon.

b. Sheraz Khan bin Booty Khan, Nomor Passport LF4125722, Umur 23 tahun (Lahore, 16-03-1995), Kewarganegaraan Pakistan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, beralamat asal House No.3 Street No.12 Nabi Nagar Ghazi Abad, Taj Pura, Lahore Cantt District Lahore, Punjab, Pakistan, alamat di Indonesia Jl. Nayaga No.2A, Rt.005 Rw.003,

Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai Termohon I.

c. Razina binti H. Nisar Ahmad (alm), NIK.3273136305720003, Umur 46 tahun (Tasikmalaya, 23-05-1972), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, beralamat di Jl. Nayaga No.2A, Rt.005 Rw.003, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

## **2. Duduk Perkara**

Permasalahan ini bermula pada tanggal 30 Januari 2016 Pemohon bertugas untuk menghadiri peristiwa pencatatan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II rencana perkawinan tersebut telah diregistrasi dalam berkas daftar pemeriksaan nikah nomor 023/06/2016, tertanggal 15 Januari 2016 dan terjadinya peristiwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II dicatatkan dalam akta nikah nomor 040/07/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

Pada tanggal 09 Juli 2018 adanya surat somasi melalui kuasa hukumnya Fiaz Servia bin H. Nisar Ahmad (alm) selaku kakak kandung laki-laki seapak dan seibu, dalam pengakuannya menerangkan bahwa tidak pernah hadir menjadi wali nikah atau mewakilkan kepada orang lain untuk pencatatan perkawinan tersebut serta tidak menandatangani pada kolom yang disediakan untuk itu dalam akta nikah, demikian pula tidak terdapatnya

hadir dua orang saksi yang jujur pada saat pencatatan perkawinan dimaksud dan dengan adanya penjelasan wali nikah tersebut, dapat diduga adanya unsur kebohongan dan keterangan palsu dari pihak-pihak yang menghendaki adanya pencatatan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang mengakibatkan terdapatnya cacat hukum, oleh karena tidak terpenuhinya syarat serta rukun nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut syariat Islam.

Pemohon sangat keberatan dengan adanya kebohongan dan keterangan palsu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maupun pihak-pihak yang menghendaki adanya pencatatan perkawinan dimaksud, maka demi kepentingan hukum, perkawinan Termohon I dengan Termohon II harus dibatalkan, karena tidak terpenuhinya syarat- syarat perkawinan dan dengan adanya surat somasi tersebut pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Bandung sebagaimana suratnya tertanggal 17 Juli 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register No. 3043/Pdt.G/2018/PA. Badg. Tanggal 17 Juli 2018.

Dalam persidangan ini untuk kepentingan Termohon II telah datang menghadap keluarganya (adik kandungnya bernama Feroz bin Nizhar Ahmad) didampingi kuasa hukumnya bernama Dedy Iskandar SH., berdasar surat kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018. Dengan kehadiran adik kandung Termohon I dan keluarganya dalam persidangan menerangkan bahwa

Termohon II sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2018 sehubungan dengan adanya gugatan pembatalan Perkawinan Termohin Idengan Termohon II, maka dirinya sebagai ahki waris dari alm. Termohon II mempunyai kepentingan hukum untuk ikut membela hak-hak Termohon II. Selama persidangan ini berlangsung Termohon I tidak pernah datang menghadap kemuka sidang sekalipun dan tidak pula mengirim orang lain untuk datang menghadap di muka siding sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Keluarga Termohon II/kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan setuju perkawinan Termohon I dengan Termohon II untuk dibatalkan karena ada manipulasi data dimana dalam buku nikah tersebut sebagai yang menjadi wali nikah adalah kaka kandung Termohon II bernama Fiaz Servia padahal secara depacto pada saat akad nikah dilangsungkan tidak pernah menghadirinya apalagi menjadi wali nikah. Untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi begitu juga kuasa keluarga alm. Termohon II menghadirkan bukti tertulis.

#### **B. Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan oleh Pejabat Yang Berwenang Terhadap Perkawinan yang Telah Putus Karena Kematian**

Pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak

sah (No Legal force or declared Void), dan sesuatu yang dinyatakan no legal force, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (never exizted).<sup>44</sup>

Pembahasan pembatalan perkawinan dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22, dinyatakan dengan tegas bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsung-kan perkawinan.” dan di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada pasal 70 sampai Pasal 76.

Khusus dalam hubungan suami isteri, seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dalam hal perkawinan itu dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Tapi dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya, untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya itu gugur dan pembatalan perkawinan ahanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.<sup>45</sup>

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang

---

<sup>44</sup> Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan :Zahir Trading, 1975), hal 71.

<sup>45</sup> K. Wantjik Saleh, S.H., *Op.Cit*, Hlm.31-32.



2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Pada pasal 37 Peraturan Pelaksanaannya menyatakan, bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Dan batalnya perkawinan termaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan itu (Vide pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan). Permohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada Pengadilan daerah hukum dimana perkawinan yang dimohonkan pembatalannya itu dilangsungkan atau tempat tinggal suami isteri, suami atau isteri (pasal 24 UU Perkawinan). Dan permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh pihak yang berhak (pasal 38 Peraturan Pelaksanaannya).<sup>46</sup> Meskipun terdapat alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan, tetapi tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pihak – pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;

---

<sup>46</sup> Riduan Syahrani, S.H., Abdurrahman, S.H., 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Hlm. 37

- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73 pihak-pihak

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.<sup>47</sup>

Tetapi hingga saat ini urusan mengenai kewenangan mencatat pernikahan dan mengawasi bawahannya dalam melaksanakan tugasnya tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri. KUA sebagai lembaga pencatat dan pengawas jalannya pernikahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat awam akan hukum harus menempatkan dirinya sebagai lembaga pengayom yang sesungguhnya, sesuai dengan kedudukannya. Dalam menjalankan tugasnya, dalam mempertegas pihak-pihak yang akan menikah maka sebelum melakukan pengisian formulir, PPN atau Pembantu Pegawai

---

<sup>47</sup> Lihat Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

Pencatat Nikah (P3N) haruslah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap rukun dan syarat pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan.<sup>48</sup>

Sesuai dengan Undang – undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 23 huruf c dan Kompilasi Hukum Islam pasal 73 huruf c bahwasannya salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Dalam putusan perkara pembatalan perkawinan antara Drs. H. Dadang bin A. Hasanuddin Jabatan Pengulu Madya pada KUA Kecamatan Lengkong Bandung sebagai Pemohon dengan Shiraz Khan bin Booty Khan sebagai Termohon I dan Razina binti H. Nisar Ahmad (alm) sebagai Termohon II telah disebutkan beberapa alasan yang mendasari pemohon mengajukan pembatalan perkawinan, berdasarkan surat somasi tertanggal 09 Juli 2018 melalui kuasa hukumnya Fiaz Servia bin H. Nisar Ahmad (alm) selaku kakak kandung laki-laki seapak dan seibu, dalam pengakuannya menerangkan bahwa tidak pernah hadir menjadi wali nikah atau mewakilkan kepada orang lain untuk pencatatan perkawinan tersebut serta tidak menandatangani pada kolom yang disediakan untuk itu dalam akta nikah, demikian pula tidak terdapatnya hadir dua orang saksi yang jujur pada saat pencatatan perkawinan dimaksud.

---

<sup>48</sup> Muhammad Sulhi Mahbub, *Op.Cit*, Hlm. 62

Maka dengan adanya penjelasan wali nikah tersebut, dapat diduga adanya unsur kebohongan dan keterangan palsu dari pihak-pihak yang menghendaki adanya pencatatan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang mengakibatkan terdapatnya cacat hukum, oleh karena tidak terpenuhinya syarat serta rukun nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut syariat Islam, sebagaimana bunyi hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., Ahmad, dan Abu Hurairah, sebagai berikut: "tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi", dan disini jelas bahwa dalam perkawinan ini kurang terpenuhinya rukun nikah yang ke tiga yakni wali nikah maka dari itu apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat (1) yang berbunyi :

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) tersebut maka perkawinan ini dapat dibatalkan dengan alasan wali nikah yang tidak sah dan juga berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1975, berbunyi:

"Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Ditegaskan pula menurut Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan Pasal 73 huruf c bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

"Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang"

Perkawinan yang melanggar syarat-syarat formil dan materiil maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Oleh karena itu sebelum berlangsungnya suatu perkawinan perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap wali nikah dan calon suami-isteri tersebut, untuk mengetahui apakah syarat perkawinan yang diperlukan telah dipenuhi atau tidak ada halangan yang merintangi pelaksanaan perkawinan itu.<sup>49</sup>

Maka dengan demikian perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Dalam hal ini pemohon berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

"Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan"

Juncto Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dimana Pemohon sebagai Pejabat yang berwenang mempunyai legitimatie in yudicio dalam perkara a quo, oleh karena berhak dan beralasan hukum untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Termohon I dan Termohon II.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan pembatalan nikah Termohon I dengan Termohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2016 sesuai bukti Kutipan Akta

---

<sup>49</sup> Avriaztheni Putri Gayatri, *Op.Cit*, Hlm. 38.

Nikah No. 040/07/11/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lengkong Kota Bandung tanggal 01 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kota Bandung, status pekerjaan sebagai seorang PNS di lingkungan Kemetrian Agama Kota Bandung yang sejak 01 Oktober 2011 menjabat sebagai Penghulu Madya pada KUA Kecamatan Lengkong Kota Bandung;

Menimbang, bahwa pembatalan nikah yang dianut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah relatif neitig, yaitu hanya orang-orang tertentu yang berhak mengajukannya, maka karenanya harus dipertimbangkan apakah Pemohon layak mengajukan pembatalan atau tidak, yang dalam hal ini Pengadilan berpendirian sebagai berikut:

Bahwa sesuai pasal 23 huruf (c) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa yang berhak mengajukan pembatalan adalah pelabat yang berwenang selama perkawinan tersebut belum diputus, ternyata yang dimaksud pejabat yang berwenang oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pejabat tersebut;

Bahwa oleh karenanya dalam hal ini Pengadilan berpendapat salah seorang pejabat tersebut adalah kepala Kantor Urusan Agama selaku PPN yang mempunyai kewenangan mencatat pernikahan dan mengawasi bawahannya dalam melaksanakan tugasnya,. hal ini berdasarkan ayat (1)

pasal 1 undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jis ayat (1) pasal 43

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan dapat menerima permohonan yang diajukan Pemohon karena Pemohon mempunyai kompetensi untuk mengajukannya;

Dalam hal ini mengapa pengadilan berpendapat mengenai pasal 23 huruf C salah seorang pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan adalah kepala Kantor Urusan Agama Agama selaku PPN yang mempunyai kewenangan mencatat pernikahan dan mengawasi bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Perkawinan sendiri dapat dibatalkan apabila setelah berlangsung akad nikah, diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pembatalan pernikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pernikahan dilangsungkan atau tempat tinggal suami isteri. Sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yaitu garis keturunan ke atas dari suami maupun isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, pejabat yang di tunjuk peraturan perundang-undangan menurut Undang - undang no.1 tahun 1974 pasal 16 ayat (2).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Iwan Setianto, *Analisis Terhadap Pernikahan dengan memalsukan Identitas Wali Nikah*, Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2014, Hlm. 43

- 1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- 2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi memang benar apabila pengadilan berpendapat yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang selama perkawinan tersebut belum diputus dan salah seorang pejabat tersebut adalah kepala Kantor Urusan Agama Agama selaku PPN yang mempunyai kewenangan mencatat pernikahan dan mengawasi bawahannya dalam melaksanakan tugasnya dan pengadilan dapat menerima permohonan tersebut karena beberapa alasan :

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kota Bandung, status pekerjaan sebagai seorang PNS di lingkungan Kemetrian Agama Kota Bandung yang sejak 01 Oktober 2011 menjabat sebagai Penghulu Madya pada KUA Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
2. Menimbang, bahwa pembatalan nikah yang dianut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah relatif neitig, yaitu hanya orang-orang tertentu yang berhak mengajukannya;Bahwa sesuai pasal 23 huruf (c) undang-undang Nomor 1 hun 1974, bahwa yang berhak mengajukan pembatalan adalah pelabat yang berwenang selama perkawinan tersebut belum diputus,



3. Ternyata yang dimaksud pejabat yang berwenang oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pejabat tersebut;
4. Bahwa oleh karenanya dalam hal ini Pengadilan berpendapat salah seorang pejabat tersebut adalah kepala Kantor Urusan Agama selaku PPN yang mempunyai kewenangan mencatat pernikahan dan mengawasi bawahannya dalam melaksanakan tugasnya,. hal ini berdasarkan ayat (1) pasal 1 undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jis ayat (1) pasal 43 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990;

Alasan tersebut diperkuat dalam Peraturan Menteri Pasal 4 Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, berbunyi :

“Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.”<sup>51</sup>

Bagi seorang penghulu, Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber utama pelaksanaan hukum

---

<sup>51</sup> Lihat Pasal 4 angka (1), Peraturan Menteri Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam UUP, KHI dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan.<sup>52</sup>

Dan juga ketika berbicara tentang pembatalan perkawinan apabila dikaitkan dengan pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang berbunyi :

“Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.”<sup>53</sup>

Berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas maka penulis sepakat bahwa memang benar pemohon yakni yang memiliki Jabatan Penghulu Madya pada KUA Kecamatan Lengkong Bandung merupakan pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan Menurut Undang-undang sehingga mempunyai kompetensi dan bisa mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya, cet 2, 1993, hlm. 25.

<sup>53</sup> Lihat Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pejabat yang Berwenang Terhadap Perkawinan yang Telah Putus Karena Kematian**

Tentang pengertian perkawinan sendiri sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.<sup>54</sup>

Dan selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>55</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan, maka bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi Warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam yang hendak melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan adalah ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya masing - masing.

---

<sup>54</sup> Lihat *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*

<sup>55</sup> Lihat *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*

Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Apabila ancaman telah berhenti dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.<sup>56</sup>

Kemudian apabila kita teliti bunyi pasal 26 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan :

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”<sup>57</sup>

Perkawinan yang dapat dibatalkan, tidak saja perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti tersebut diatas, tetapi juga perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>58</sup>

Dalam putusan perkara pembatalan perkawinan antara Drs. H. Dadang bin A. Hasanuddin Jabatan Pengulu Madya pada KUA Kecamatan Lengkon

---

<sup>56</sup> [Letezia Tobing, S.H., M.Kn., Tentang Pembatalan Nikah dan Cerai, https://www.hukumonline.com/](https://www.hukumonline.com/), 29 Juni 2020.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Perkawinan

<sup>58</sup> Ibid., Hlm. 37.

Bandung sebagai Pemohon dengan Shiraz Khan bin Booty Khan sebagai Termohon I dan Razina binti H. Nisar Ahmad (alm) sebagai Termohon II, disini pemohon mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan antara termohon I dan termohon II yang dimana sudah dijeaskan dalam putusan Nomor 3043/Pdt.G/2018/PA.Badg bahwasannya termohon II yakni Razina binti H. Nisar Ahmad sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2018 di rumah sakit Mount Elizabet Singapura di karenakan sakit, disertakan juga fotocopy Surat Kematian an. Razina binti H. Nisar Ahmad dari rumah sakit Mount Elizabet Singapura tanggal 25 Mei 2018 dan Surat Kematian an. Razina dari Kelurahan Turangga tanggal 30 Mei 2018 sedangkan pengajuan gugatan pembatalan perkawinan oleh pemohon yakni pada tanggal 17 Juli 2018, jadi gugatan pembatalan perkawinan ini diajukan setelah meninggalnya termohon II. Kemudian hakim memberikan pertimbangannya terkait tentang gugatan pembatalan perkawinan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.2 dan T.II.3a telah ditemukan fakta bahwa Termohon II telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.1b telah ditemukan fakta bahwa antara Feroz bin H. Nisar Ahmad masih satu nasab dengan alm.Razina binti H. Nisar Ahmad (Termohon II) oleh karena itu cukup beralasan apabila yang bersangkutan untuk ikut terlibat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II didasari adanya surat somasi dari pihak keluarga Termohon II yakni dari saudara kandungnya sendiri bernama (Fiaz Servia bin Nisar Ahmad) melalui kuasa hukumnya tanggal 09 Juli 2018 yang isinya pernyataan keberatan atas perkawinan Termohon I dengan Termohon II karena dirinya tidak pernah menjadi wali nikah dan juga tidak pernah menghadiri acara pernikahan Termohon dimaksud, tetapi dalam Buku Daftar Pemeriksaan Menikah, Buku Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah ditulis nama wali nikah adalah wali nasab Termohon II bernama Fiaz Servia bin Nasar Ahmad, atas dasar somasi tersebut Pemohon menyadari atas kekeliruan yang dilakukannya dan juga ada unsur rekayasa/kebohongan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan "bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian bagi orang Islam perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada (a).

Calon Suami, (b). Calon Istri, (c). Wali Nikah, (d). Dua orang Saksi, (e). Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pernyataan Pemohon dalam surat permohonannya, kemudian dihubungkan dengan pengakuan keluarga Termohon II serta keterangan seorang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta pada saat pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2016 sebagaimana bukti Akta Kutipan Buku Nikah No. 040/07/11/2016 tgl. 01 Februari 2016 tidak ada hadir wali nikah sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah dan Akta Kutipan Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa Akta Nikah Nomor 040/07/1/2016 tgl. 01 Februari 2016 yang dikeluarkan kantor Urusan Agama kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah berupa penetapan atau dalam istilah Tata Usaha Negara dikenal dengan istilah Ketetapan atau Beschiking, yang dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan doktrin Prof. V.d Pot. Yang dikutip oleh R. Atang dalam bukunya HTN 1989:24 yang menyatakan, bahwa "..... sarat sahnya suatu penetapan ada 4, diantaranya: tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan, ....." sehingga berdasarkan pendapat tersebut harus dinyatakan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA kecamatan Lengkong sebagaimana tersebut di atas, tidak sah karena adanya unsur penipuan dan kekeliruan baik disengaja ataupun tidak yang dilakukan Pemohon, Termohon

I, dan Termohon II baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, yang antara lain:

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II pada saat pemeriksaan nikah telah menyatakan bahwa yang akan menjadi wali nikahnya adalah wali nasab bernama Fiaz Servia bin H Nisar Ahmad;
2. Bahwa ternyata pada saat pernikahan dilangsungkan wali nasab tersebut tidak hadir dalam acara akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan sependapat dengan dokian dari E Utrecht dalam bukunya Pengantar Administrasi Indonesia, 1985:95 bahwa Penetapan yang tidak sah harus dinyatakan batal (nietig) dengan sebab mengandung kekurangan 'essensiel', dan akibatnya ketetapan tersebut harus dianggap tidak pernah ada dan terhapus";

Bahwa Pengadilan berpendapat hal yang esensial dalam suatu perkawinan adalah keberadaan wali beserta izinnya, sehingga dengan demikian pernikahan tersebut telah cacat dan tidak sah dan dengan sendirinya Akta Nikah Nomor 040/07/II/2016 tgl. 01 Februari 2016 yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah cacat dan batal dan harus dinyatakan tidak pernah ada, ini sejalan dengan bunyi ayat (1) pasal 28 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan tersebut;



Dalam persidangan ini pengadilan mengabulkan permohonan pemohon dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Membatalkan perkawinan antara **Termohon I (Sheraz Khan bin Booty Khan)** dengan **Termohon (Razina binti H. Nisar Ahmad -alm-)** yang dilangsungkan pada tanggal 30 Januari 2016 di wilayah hukum Kantör Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 040/07//2016, tanggal 01 Februa2016 atas nama **Termohon I (Sheraz Khan bin Booty Khan)** dan **Termohon II (Razina binti H. Nisar Ahmad -alm-)** yang retensinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 814.000,- (delapan ratus empat belas ribu rupiah)

Dalam perkara pembatalan perkawinan antara Drs. H. Dadang bin A. Hasanuddin sebagai Pemohon dan Sheraz Khan bin Booty Khan sebagai Termohon I dan Razina binti H. Nisar Ahmad (alm) sebagai Termohon II ini, memang benar apabila dari pihak Termohon memalsukan wali nikah karena didasari adanya surat somasi dari pihak keluarga Termohon II yakni dari

saudara kandungnya sendiri bernama (Fiaz Servia bin Nisar Ahmad) melalui kuasa hukumnya tanggal 09 Juli 2018 yang isinya pernyataan keberatan atas perkawinan Termohon I dengan Termohon II karena dirinya tidak pernah menjadi wali nikah dan juga tidak pernah menghadiri acara pemikahan Termohon dimaksud, tetapi dalam Buku Daftar Pemeriksaan Menikah, Buku Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah ditulis nama wali nikah adalah wali nasab Termohon II bernama Fiaz Servia bin Nasar Ahmad.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan jumhur(mayoritas) ulama, kecuali oleh madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, terlebih jika perempuan tersebut telah akil baligh dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan maupun perbuatannya.

Pada kenyataannya, masyarakat sering menganggap remeh masalah perwalian dalam pernikahan dan akibat yang ditimbulkannya. Ada beberapa kasus mengenai pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan wali nikah. Oleh karena itu, perkawinan dengan pemalsuan wali nikah dapat dibatalkan

karena menikah tanpa seizin walinya. Pernikahan tersebut adalah fasid (rusak) sebab wali sebagai bagian dari rukun pernikahan yang tidak terpenuhi.<sup>59</sup>

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian bagi orang Islam perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) Calon Suami
- b) Calon Istri
- c) Wali Nikah
- d) Dua orang Saksi
- e) Ijab dan Kabul

Maka konsekuensi terhadap pernikahan dengan memalsukan wali nasab adalah batalnya perkawinan tersebut karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Oleh karena itu dalam perkara ini Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon yang membatalkan

---

<sup>59</sup> Muhammad Sulhi Mahbub, Skripsi Fakultas Syari'ah 2016, *Upaya Pembatalan Pernikahan Atas Kesalahan Penetapan Wali Hakim Oleh Wali Nasab (Studi Kasus Pernikahan driengan Akta 04/04/1/2012 di KUA Kecamatan Pabelan)*, Hlm. 66

perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dengan alasan - alasan sebagai berikut :

- 1) Ternyata berdasarkan pernyataan Pemohon dalam surat permohonannya, kemudian dihubungkan dengan pengakuan keluarga Termohon II serta keterangan seorang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta pada saat pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dilangsungkan pada tanggal 30 Januari 2016 sebagaimana bukti Akta Kutipan Buku Nikah No. 040/07/11/2016 tgl. 01 Februari 2016 tidak ada hadir wali nikah sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah dan Akta Kutipan Nikah dimaksud
- 2) Akta Nikah Nomor 040/07/1/2016 tgl. 01 Februari 2016 yang dikeluarkan kantor Urusan Agama kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah berupa penetapan atau dalam istilah Tata Usaha Negara dikenal dengan istilah Ketetapan atau Beschiking, yang dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan doktrin Prof. V.d Pot. Yang dikutip oleh R. Atang dalam bukunya HTN 1989:24 yang menyatakan, bahwa "..... sarat sahnya suatu penetapan ada 4, diantaranya: tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan, ....." sehingga berdasarkan pendapat tersebut harus dinyatakan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA kecamatan Lengkong sebagaimana tersebut di atas, tidak sah karena adanya unsur penipuan dan kekeliruan baik disengaja ataupun tidak yang dilakukan Pemohon, Termohon I, dan

Termohon II baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, yang antara lain:

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II pada saat pemeriksaan nikah telah menyatakan bahwa yang akan menjadi wali nikahnya adalah wali nasab bernama Fiaz Servia bin H Nisar Ahmad;
2. Bahwa ternyata pada saat pernikahan dilangsungkan wali nasab tersebut tidak hadir dalam acara akad nikah tersebut;
- 3) Menimbang, bahwa Pengadilan sependapat dengan dokian dari E Utrecht dalam bukunya Pengantar Administrasi Indonesia, 1985:95 bahwa Penetapan yang tidak sah harus dinyatakan batal (nietig) dengan sebab mengandung kekurangan 'essensiel', dan akibatnya ketetapan tersebut harus dianggap tidak pernah ada dan terhapus";
- 4) Bahwa Pengadilan berpendapat hal yang esensial dalam suatu perkawinan adalah keberadaan wali beserta izinnya, sehingga dengan demikian pernikahan tersebut telah cacat dan tidak sah dan dengan sendirinya Akta Nikah Nomor 040/07/II/2016 tgl. 01 Februari 2016 yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah cacat dan batal dan harus dinyatakan tidak pernah ada, ini sejalan dengan bunyi ayat (1) pasal 28 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan tersebut.

Akibat hukum terhadap anak dari dibatalkannya perkawinan tidak serta merta menghilangkan kewajiban orang tua untuk menelantarkan anaknya. Baik dalam UUP maupun KHI dengan tegas menyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut, meskipun salah seorang dari orang tuanya beritikad buruk/keduanya beritikad buruk. Ini berdasarkan rasa kemanusiaan dan kepentingan anak-anak sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pasca pembatalan perkawinan, ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial, apalagi dari perkawinan antara mereka telah dilahirkan anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan statusnya jelas anak sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Oleh sebab itu, sudah jelas aturannya baik di dalam Alquran, Hadis, Undang-Undang maupun KHI, pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi hubungan anak dengan orang tuanya. Anak tetap dianggap anak sah dan dinasabkan kepada ayahnya. Ia juga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan dan waris dari kedua orang tuanya.

Selanjutnya akibat hukum terhadap harta bersama apabila perkawinan itu putus, maka suami tidak berhak mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 20 yang berbunyi: Artinya: “Dan jika kamu ingin

mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.” (QS. AnNisa: 20).

Pasal 96 KHI menyatakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah di Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga.<sup>30)</sup> Namun ketentuan dalam KHI ini bukanlah suatu putusan hukum yang paten, jika suami istri sepakat membagi harta dengan persentase tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka didahulukan. Syariat tidak membagi harta gono-gini ini dengan bagian masing-masing secara pasti, misalnya istri 50% dan suami 50%. Sebab, tidak ada nash yang mewajibkan demikian baik dari Alquran maupun sunah. Namun pembagiannya bisa ditinjau dari beberapa kemungkinan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Yulianti Maulidya, Imelda Martinelli, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam”, Jurnal Hukum Adigama, Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Dosen Hukum

Penulis dalam hal ini sependapat dengan pertimbangan hakim, bahwa perkawinan antara Termohon I dengan termohon II tidak dapat di katakan sah menurut hukum agama yang dianut oleh keduanya, dalam hal ini Hakim melihat perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak sah di karenakan perkawinan ini bisa dibatalkan dengan alasan hal yang essensial dalam suatu perkawinan adalah keberadaan wali beserta izinnya, sehingga dengan demikian pernikahan tersebut telah cacat dan tidak sah dan dengan sendirinya Akta Nikah Nomor 040/07/11/2016 tgl. 01 Februari 2016 yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah cacat dan batal dan harus dinyatakan tidak pernah ada, ini sejalan dengan bunyi ayat (1) pasal 28 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan tersebut.

Pertimbangan Hakim terkait alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II didasari dan diperkuat dengan adanya surat somasi dari pihak keluarga Termohon II yakni saudara kandungnya sendiri (Fiaz Servia bin Nisar Ahmad) yang isinya pernyataan keberatan atas perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II karena dirinya tidak pernah menjadi wali nikah dan juga tidak pernah menghadiri acara pernikahan Termohon dimaksud, tetapi dalam Buku Daftar Pemeriksaan



Menikah, Buku Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah ditulis nama wali nikah adalah wali nasab Termohon II bernama Fiaz Servia bin Nasar Ahmad, atas dasar somasi tersebut Pemohon menyadari atas kekeliruan yang dilakukannya dan juga ada unsur rekayasa/kebohongan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dan juga bahwa ternyata berdasarkan pernyataan Pemohon dalam surat permohonannya, kemudian dihubungkan dengan pengakuan keluarga Termohon II serta keterangan seorang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta pada saat pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dilangsungkan pada tanggal 30 Januari 2016 sebagaimana bukti Akta Kutipan Buku Nikah No. 040/07/I/2016 tgl. 01 Februari 2016 tidak ada hadir wali nikah sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah dan Akta Kutipan Nikah dimaksud, dengan beberapa pertimbangan Hakim tersebut telah memperkuat alasan bisa dibatalkannya perkawinan anatar Termohon I dengan Termohon II.

Pembatalan perkawinan sendiri diatur dalam pasal 22 sampai pasal 28 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan

dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

3) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

4) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

5) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

6) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

7) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak

mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.<sup>61</sup>

Mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b) Suami atau isteri;
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.<sup>62</sup>

Tetapi apabila dikaitkan dengan pasal 23 huruf (c) penulis TIDAK SEPAKAT dengan ketetapan hakim yang menyatakan mengabulkan permohonan dari pemohon yakni membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II karena dalam pasal 23 huruf (c) disebutkan perkawinan bisa dibatalkan oleh pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putus, akan tetapi dalam perkara ini Pemohon sendiri mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan

---

<sup>61</sup> Lihat Pasal 22 sampai pasal 28 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>62</sup> Lihat Pasal 23 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Termohon II yakni pada tanggal 17 Juli 2018, setelah salah satu pihaknya yakni Termohon II meninggal dunia yaitu pada bulan Mei 2018 di rumah sakit Mount Elizabet Singapura di karenakan sakit, maka seharusnya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak dapat dibatalkan karena apabila dilihat dari peraturan yang ada dalam hukum positif tersebut maka memang tidak diatur mengenai pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang sudah putus karena kematian (pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon setelah salah satu pihaknya yakni Termohon II meninggal dunia). Dengan kata lain, peraturan pembatalan perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak ada yang mengatur mengenai hal tersebut. Maka dari itu seharusnya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak dapat dibatalkan dikarenakan sudah otomatis perkawinannya putus karena kematian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melaui analisis yang dilakukan oleh penulis dengan metode yuridis normatif maka pada bagian ini penulis dapat memaparkan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Didalam perkawinan yang telah dimintakan permohonan pembatalan perkawinannya oleh Pemohon yakni Drs. H. Dadang bin A. Hasanuddin Pengulu Madya pada KUA Kecamatan Lengkong Bandung bisa dilakukan pembatalan perkawinan dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam yakni memalsukan wali nasab dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bandung dengan memeriksa bukti-bukti yang telah ada dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Kantor Urusan Agama selaku PPN mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dan salah satu pihak tersebut yang bisa melakukan pengajuan gugatan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang karena memiliki kompetensi untuk mengajukannya tetapi hanya selama perkawinan belum diputuskan.

2. Dari ketetapan Hakim yang mengabulkan pembatalan perkawinan dalam perkara ini memang benar perkawinan ini bisa dilakukan pembatalan perkawinan, karena dalam pasal 23 huruf (c) disebutkan perkawinan bisa dibatalkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat yang memiliki kompetensi) tetapi hanya selama perkawinan tersebut belum di putuskan, akan tetapi dalam perkara ini Pemohon sendiri mengajukan gugatan pembatalan perkawinan setelah salah satu pihaknya meninggal dunia dikarenakan sakit maka seharusnya perkawinan dalam perkara ini tidak dapat dibatalkan karena apabila dilihat dari peraturan yang ada dalam hukum positif tersebut maka memang tidak diatur mengenai pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang sudah putus karena kematian.

## **B. Saran**

Maka dalam hal ini saran yang dapat diberikan penulis setelah melakukan analisis pada bab sebelumnya diantara lain sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan sebuah perkawinan harus diperhatikan dan dicek mengenai identitas diri dari calon pengantin secara mendetail dan lebih teliti dalam memperhatikan berkas-berkas pengajuan persyaratan perkawinan serta pemeriksaan secara materiil dengan menghadirkan para pihak bersangkutan.

2. Hendaknya bagi pihak-pihak yang ingin melangsungkan pernikahan ada baiknya memahami dan mempelajari prosedur yang telah ditetapkan serta adanya kesadaran hukum.

3. Hendaknya bagi hakim melihat putusan sebelumnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dan berdiskusi lebih dalam dan luas dalam menggunakan dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum* (cetakan ke-11). Jakarta : Kencana.
- Prakoso, Djoko dan Ketut Murtika, S.H. 1987. *Azas – Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1991. *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Cetakan ke-9). Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, Mr Martiman. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarata: Indonesia Legal center.
- Saleh, K. Wantjik Saleh. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta; Ghalia indonesia.
- Syahrani, Riduan dan Abdurrahman. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Syarifuddin, Amir. 1993. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Cetakan ke-2). Padang : Angkasa Raya.

### JURNAL :

- Faisal. 2017. “*Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*”. Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan. Vol. 4 No. 1 Hlm. 3. Langsa: Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa.
- Maulidya, Imelda Martinelli. 2018. “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam*”. Jurnal Hukum Adigama. Jakarta : Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.



- Munawar Akhmad. 2015. *“Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”*. Journal Article. Al’ Adl Volume VII Nomor 13 Hlm. 25. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banajari.
- Rusli, Tami. 2013. *“Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*. Jurnal Pranata Hukum Vol. 8, No. 2. Bandar Lampung: Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

#### **SKRIPSI :**

- Mahbub, Muhammad Sulhi. 2016. *Upaya Pembatalan Pernikahan Atas Kesalahan Penetapan Wali Hakim Oleh Wali Nasab (Studi Kasus Pernikahan dengan Akta 04/04/I/2012 di KUA Kecamatan Pabelan)*. (Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga)
- Musriyadi. 2012. *Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 929/Pdt.G/2007/PA.Pwt)*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto)
- Putri Gayatri, Avriaztheni. 2010. *Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Sudah Putus Karena Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor :2085/PDT.G/2004/PA.TS)*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Indonesia).
- Setianto, Iwan. 2014. *Analisis Terhadap Pernikahan dengan memalsukan Identitas Wali Nikah*. (Skripsi, Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)
- Zefanya Lien Sebesty, Iin. 2013. *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks)*. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).

#### **INTERNET :**

Tobing, [Letezia](https://www.hukumonline.com/). 2015. *Tentang Pembatalan Nikah dan Cerai*.  
<https://www.hukumonline.com/>. Di akses pada tanggal 29 Juni  
2020.

#### **UNDANG-UNDANG :**

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan  
Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Peraturan Pemerintah Pasal 38 Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat Tugas



#### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 463513, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144

#### SURAT TUGAS

Nomor: E.6.o/652/FH-UMM/XI/2019

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Mohammad Isrok, SH., CN., M.H.  
Pembimbing I
2. Nama : Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn  
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Riski Diana Sari  
NIM : 201610110311244  
Judul Skripsi : Analisis Pengenaan Mekanisme Pajak Penghasilan Terhadap Influencer

Tugas dilaksanakan sejak surat tugas dikeluarkan sampai dengan selesai.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 13 Nopember 2019



Dr. Isdian Anggraeny, SH., M.Hum

## Lampiran 2 : Surat Observasi



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas No 246 Telp (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188 Fax (0341) 460782 Malang 65144

Nomor : E.6.k/096/FH-UMM/II/2020  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Observasi

Kepada : Yth. Kepala Kantor Advokat Soehartono Soemarto Dan Rekan Kota  
Malang  
Jl. Tidar Sakti , No.18, Karangbesuki, Kec.Sukun, Kota Malang  
di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, bahwa dalam rangka menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S-1), maka kepada mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediannya Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada:

Nama : Riski Diana Sari  
NIM : 201610110311244  
No. HP Mahasiswa : 085255576838  
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Mnatan Suami Terhadap Harta Bersama

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Malang, 07 Februari 2020


A.n Dekan,

Wakil Dekan I



Catut Widi Naruni, SH., M.Si., M.Hum

**Lampiran 1 : Kartu Kendali Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1 dan 2**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188

---

**KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

1. Nama Mahasiswa : Riski Dhanu Sari

2. No. Induk Mahasiswa : 20160110311244

3. Judul Tugas Akhir : Analisis Pengenaan Mekanisme Pajak Penghasilan Terhadap Influencer

4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir : .....

5. Dosen Pembimbing : 1. M. Isrok S.H., Ctl., M. Hum  
 2. Isdian Anggraeny

6. Jadwal bimbingan : Mulai ..... Tgl. s/d .....

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1.	26-10-2019	<i>[Signature]</i>		Tentukan PPH. akuntansi
2.	05-11-2019	<i>[Signature]</i>		Struktur normatif
3.	03-12-2019		<i>[Signature]</i>	- Pengumpulan data hukum sekunder - persurvey - Pencarian kasus-kasus terkait + help lokan penelitian
4.	30-12-2019	<i>[Signature]</i>		Uraian bail cari kerm Tinjauan put pafah
	4-2-2020	<i>[Signature]</i>		Cari putusan spy fokus pd kasus ttt
	26-2-2020	<i>[Signature]</i>		Cari masalah hukum dalam putusan tersebut.
	4-3-2020	<i>[Signature]</i>		Simpul
	1-7-2020	<i>[Signature]</i>		Uraian masalah bimbingan & revisi, norma. Fak. H.
	10-7-2020	<i>[Signature]</i>		Bab II, jalan di perbaiki Bab III bisa di kuyah
	24-8-2020	<i>[Signature]</i>		Perbaikan mengah 4 II III IV
	22-9-2020	<i>[Signature]</i>		Perbaikan Bab III
	22-9-2020		<i>[Signature]</i>	Perbaikan pada Bab II dan Bab IV
	22-9-2020		<i>[Signature]</i>	





## Lampiran 2 : Surat Berita Acara Seminar Proposal



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124 Malang

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR**

Pada hari ini Rabu tanggal 11 Maret 2020

Telah dilaksanakan Seminar Proposal TUGAS AKHIR, dengan Presenter Sebagai Berikut :

Nama : Riski Diana Sari  
No. Induk : 201610110311244  
Judul TA : Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Pada Perkawinan  
Yang Sudah Putus Karena Kemafian ( Studi Putusan  
Nomor 3034 / Pdt - G / 2018 / PA - Badg )

Hasil seminar : 1. Tidak Ada Revisi

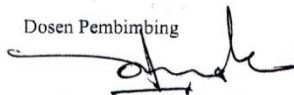
2. Revisi : Hal yang direvisi

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Demikian Berita Acara ini dibuat Rangkap 2 (dua) masing-masing :

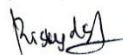
1 (satu) lembar untuk Presenter dan Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

  
M. Isrok S.H., CH., M.Hum

Malang, 11 Maret 2020

Presenter,

  
Riski Diana Sari

### Lampiran 3 : Berita Acara Seminar Proposal



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 TELP. (0341) 464318-19 Psw. 124 Malang

**DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL**

Nama mahasiswa : Riski Diana Sari  
 Nomor Induk : 2016110311244  
 Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Pada  
Perkawinan Yang Sudah Putus Karena Kematian  
(Studi Putusan Nomor 3034 / Pdt. 6 / 2018 / PA. Bdg)

No.	Nama Mahasiswa	No. Induk	Tanda Tangan
1.	Ulvy N Aroeboesman	2016 - 371	
2.	Devi Syvana Bilalqist	2016 - 390	
3.	Dida Saraswati	2016 - 057	
4.	Abdur Rahman Wahid.	2015 - 233	
5.	Husnul Khotimah	2016 - 067	
6.	Jovanca Ani Anhar	2016 - 260	
7.	Rinaldo Rian	2016 - 240	
8.	Safira Ramadhani	2016 - 313	
9.	Erik Ludo P	2016 - 083	
10.	Allen cikya	2016 - 234	
11.	Riz Novia Sapitka	2016 - 232	
12.	Ridwanul Habbah	2016 - 254	
13.	Hapidah Salsabih	2016 - 280	
14.	Etmi Nur Indah S	2016 - 301	
15.	Fina brah aryan p	2016 - 232	
16.	Athar Alessandro	2016 - 273	
17.	Rexy farzy	2016 - 271	
18.	Hendar Zein	2016 - 232	
19.	lebal Gani	2016 - 263	
20.			

Malang, 11 Maret 2020

Presenter,

Riski Diana Sari

Dosen Pembimbing,

M. Isrok S.H., M.Hum



